

**STRATEGI PELIBATAN PARA PEMANGKU  
KEPENTINGAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH  
DI KABUPATEN JENEPONTO**

***THE STRATEGY OF INVOLVING STAKEHOLDERS  
IN WASTE MANAGEMENT IN JENEPONTO  
DISTRICT***

**MARHUMAH**

**P032171211**



**SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2021**

**STRATEGI PELIBATAN PARA PEMANGKU  
KEPENTINGAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH  
DI KABUPATEN JENEPONTO**

**T E S I S**

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi

Pengelolaan Lingkungan Hidup

Disusun dan diajukan oleh

**MARHUMAH**

Kepada

**SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

**LEMBAR PENGESAHAN TESIS**  
**STRATEGI PELIBATAN PARA PEMANGKU**  
**KEPENTINGAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH**  
**DI KABUPATEN JENEPONTO**

Disusun dan diajukan oleh

**MARHUMAH**

**P032171211**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Studi Pengelolaan Lingkungan Hidup  
Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin

Pada tanggal 5 Februari 2021  
dan dinyatakan telah memenuhi Syarat kelulusan

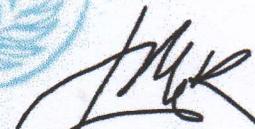
Menyetujui,

Ketua



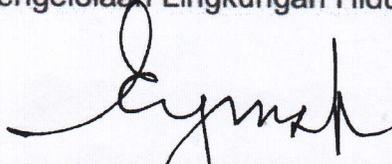
Prof. Dr. Ir. Darmawan Salman, M.Si  
NIP 196306061988031004

Anggota



Prof. Dr. Ir. Didi Rukmana, MS  
NIP 195408151978031004

Ketua Program Studi  
Pengelolaan Lingkungan Hidup



Dr. Ir. Eymal Bashar Demmalino, MS  
NIP 196408151992021001

Dekan Sekolah Pascasarjana  
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc  
NIP 196703081990031001

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Marhumah  
NIM : P032171211  
Program Studi : Pengelolaan Lingkungan Hidup /Teknik Lingkungan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau kepemilikan orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Maret 2021

Yang Menyatakan



iv/ARHUMAH

## PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, hanya atas karunianya dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan proposal ini dengan judul ” *Strategi Pelibatan Para Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Jeneponto*” merupakan syarat untuk menyelesaikan studi pada program Pasca Sarjana Pengelolaan Lingkungan Hidup Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan tesis ini masih terdapat berbagai kekurangan yang mungkin belum terkoreksi mengingat keterbatasan kemampuan, tenaga, dan waktu.

Penelitian ini dapat terlaksana dengan baik tentunya tidak lepas dari pihak-pihak terkait yang membantu, membimbing, dan serta mendukung penulis menyelesaikan tesis ini. Untuk itu dengan penuh rasa hormat, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Darmawan Salman, M.S sebagai ketua penasehat, dan Prof. Dr. Ir. Didi Rukmana, MS. anggota penasehat yang telah membimbing, memberikan arahan mulai dari pengembangan minat sampai dengan penulisan tesis ini.
2. Kedua orang tua ku. Terimakasih atas kasih sayang, perhatian, dukungan dan doa serta kesempatan belajar yang tidak bisa terbalas oleh apapun.

3. Dr. Ir. Eymal B Demmallino, M.Si ., selaku Ketua Program Studi Pengelolaan Lingkungan Hidup Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
4. Para Staf dan Dosen Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin, yang banyak membantu dalam urusan administrasi, proses perkuliahan, maupun masukan dan nasehatnya kepada penulis.
5. Suami dan anak-anak saya tercinta. Terimakasih atas dukungan dan doanya yang tidak pernah berhenti sampai penyelesaian tesis ini.
6. Terima kasih juga atas doa dan semangat yang telah diberikan selama ini kepada rekan-rekan dan sahabat PLH 2017 dan mereka yang namanya tidak tercantum tetapi telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulisan tesis ini, tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kata-kata sempurna oleh karena itu , kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Penulis berharap agar tesis ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan dan dapat menambah pengetahuan bagi pembaca. Akhir kata penulis memohon maaf atas segala kekurangan. Atas perhatiaannya penulis mengucapkan terima kasih.

Makassar, Maret 2021

Penulis

## ABSTRAK

MARHUMAH. *STRATEGI PELIBATAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH, Studi : Kabupaten Jeneponto* (dibimbing oleh Darmawan Salman dan Didi Rukmana).

Pemangku kepentingan dipandang sebagai komponen penting dari pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang baik.. Dalam pengelolaan persampahan yang rumit, terdapat beragam pemangku kepentingan yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung. Pengelolaan sampah pada dasarnya melibatkan pemangku kepentingan terdiri dari masyarakat penghasil sampah, LSM, pihak swasta, pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Masing-masing pemangku kepentingan tersebut memiliki peran dalam pengelolaan persampahan. Penelitian ini bertujuan Menganalisis kondisi persampahan di Kabupaten Jeneponto saat ini juga kondisi pengelolaan sampah yang berjalan di Kabupaten Jeneponto selama ini dan mendesain strategi pelibatan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah yang lebih efektif di Kabupaten jeneponto. Penelitian ini diawali dengan pengumpulan data dengan observasi,wawancara dan dokumentasi kemudian dibuat penyerderhanaan melalui seleksi, pemfokusan dan keabsahan data mentah menjadi informasi yang bermakna. Hasil penelitian ini menunjukkan Pemangku kepentingan yang ada dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Jeneponto memiliki pengaruh dan kepentingan diantaranya adalah : Dinas Lingkungan Hidup bidang kebersihan sebagai otoritas daerah yang memberikan sarana, prasarana persampahan, dan bantuan sosialisasi peduli lingkungan, pengurangan sampah, pengomposan dan bank sampah pada masyarakat. Pemerintah Desa memiliki kepentingan sebagai pendukung yang menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah pada strata pemerintah desa termasuk program Dinas Lingkungan Hidup yaitu dalam pengelolaan sampah. Nasabah dan pengepul berkepentingan dalam penyedia dan suplai timbulan sampah yang memiliki keuntungan dan nilai jual. Pemulung berkepentingan di TPA maupun di jalan dan sekitar pemukiman, kantor dan pertokoan berperan mengurangi jumlah timbulan sampah disumber dan dapat mengurangi jumlah sampah yang berserakan. Masyarakat memiliki kepentingan sebagai pelaku utama penghasil sampah rumah tangga yang akan menjadi penerima manfaat dan dampak dalam pengelolaan sampah nantinya. Pemangku kepentingan yang terlibat memiliki kontribusi terhadap kondisi persampahan Kabupaten Jeneponto yang belum mencapai standar yang seharusnya. Karena tingkat pelayanan yang rendah ada di daerah-daerah yang sulit untuk dijangkau dengan sarana prasarana persampahan yang ada, seperti di daerah bantaran sungai atau daerah

dengan kemiringan lahan yang cukup tinggi. Sistem pengelolaan sampah Kabupaten Jeneponto umumnya masih menerapkan sistem kumpul-angkut-buang. Namun proses pengelolaan sampah dengan sistem 3R sudah diterapkan di beberapa sumber sampah seperti di pemukiman atau perumahan di sekolah di perkantoran walaupun belum mencakup secara keseluruhan wilayah di ibukota Kabupaten Jeneponto. Pihak DLH kewalahan lantaran volume sampah yang banyak, karena belum adanya perubahan perlakuan masyarakat terhadap penanganan sampah disekitarnya.

Kata Kunci : Pemangku Kepentingan, Kabupaten Jeneponto, Dinas Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah

## ABSTRACT

MARHUMAH. *THE STRATEGY OF INVOLVING STAKEHOLDERS IN WASTE MANAGEMENT Study : Jeneponto District*, (Supervisors : Darmawan Salman and Didi Rukmana).

Stakeholders are seen as an important component of good environmental and natural resource management. In complex solid waste management, there are a variety of stakeholders involved, either directly or indirectly. Waste management basically involves stakeholders consisting of waste-producing communities, NGOs, the private sector, local government and central government. Each of these stakeholders has a role in solid waste management. This study aims to analyze the current condition of solid waste in Jeneponto Regency as well as the condition of waste management that has been running in Jeneponto Regency so far and to design strategies for involving stakeholders in more effective waste management in Jeneponto Regency. This research begins with data collection by observation, interviews and documentation, then a simplification is made through selection, focus and the validity of the raw data into meaningful information. The result of this study indicate that the stakeholders who are involved in waste management in Jeneponto Regency have influence and interests, including: Environmental Service in the field of cleanliness as the regional authority that provides facilities, infrastructure for solid waste, and socialization assistance for environmental care, waste reduction, composting and waste banks to the community. The Village Government has an interest as a supporter that bridges and shortens the range of control in the implementation of government duties and functions, including in fostering and supervising the implementation of government affairs at the village government level including the Environmental Service program, namely in waste management. Customers and collectors have an interest in the supplier and supply of waste generation which has advantages and sales value. Scavengers have an interest in the TPA as well as on the roads and around settlements, offices and shops to play a role in reducing the amount of waste generated at the source and reducing the amount of scattered waste. The community has an interest as the main actor producing household waste who will be the beneficiaries and impacts of waste management in the future. Stakeholders involved have contributed to the condition of Jeneponto Regency's solid waste that has not reached the standards it should have. This is because the low level of service is in areas that are difficult to reach by existing waste infrastructure, such as in riverbank areas or areas with relatively high slopes of land. The waste management system in Jeneponto Regency generally still applies the collect-transport-dispose system. However, the 3R system of waste management has been implemented in several sources of waste such as

residential or residential schools in offices although it does not cover the entire area in the capital of Jeneponto Regency. DLH parties are overwhelmed because of the large volume of waste, because there has not been any change in the treatment of the community towards the handling of the surrounding waste.

Keywords : Stakeholders, Jeneponto Regency, Enviromental Services, Waste Management

## DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN SAMBUNG .....	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS .....	ii
PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Ruang Lingkup Penelitian .....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	8
A. Stakeholder Dalam Pengelolaan Sampah.....	8
B. Pengelolaan Sampah.....	12
C. Kerangka Pikir Penelitian.....	20
BAB III METODE PENELITIAN .....	23
A. Jenis Penelitian .....	23
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	23

C. Jenis dan Sumber Data .....	23
D. Teknik Pengambilan Data.....	24
E. Teknik Analisis Data .....	26
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	30
A. Kondisi Persampahan DiJeneponto Saat ini.....	30
B. Kondisi Pengelolaan Sampah Yang Berjalan Di Kabupaten Jeneponto Selama Ini.....	38
C. Strategi Pelibatan Para Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan Sampah Yang Lebih Efektif Di Kabupaten Jeneponto.....	49
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran .....	66
DAFTAR PUSTAKA .....	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	71

## DAFTAR GAMBAR

halaman

Gambar 1 : Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Jeneponto.....	5
Gambar 2 : Metode Pengelolaan Sampah Dengan Sistem 3R.....	19

**DAFTAR TABEL**

	halaman
Tabel 1 : Nama Bank Sampah Di Kabupaten Jenepono	39
Tabel 2 : Operasional Pengolahan Sampah Di Kabupaten Jenepono.....	46

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Permasalahan sampah umum terjadi di beberapa negara berkembang, termasuk di negara Indonesia. Beberapa Kota/Kabupaten di Indonesia belum mampu untuk menangani permasalahan sampah yang semakin hari semakin berat, dikarenakan produksinya yang semakin meningkat. Hal tersebut tidak diiringi dengan peningkatan kemampuan pemerintah dan pemerintah daerah dalam upaya penanggulangannya (Sultan,2011).

Paradigma sebagian besar masyarakat Indonesia selama ini menganggap sampah sebagai bahan yang sudah tidak memiliki nilai guna maupun nilai ekonomi. Padahal di negara- negara berkembang sampah merupakan sumber daya yang masih dapat dimanfaatkan dan ditingkatkan nilai ekonominya. Melalui proses daur ulang yang terpadu, sampah dapat dimanfaatkan kembali menjadi bahan baku bagi industri. Apabila sampah telah mulai dipandang sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan, maka timbulan sampah yang cukup besar ini berpotensi untuk ditingkatkan nilai ekonominya melalui proses daur ulang (Sari,et al,2015).

Permasalahan ini tumbuh seiring dengan semakin berkembangnya jumlah penduduk, yang menjadikan semakin banyak barang yang

dikonsumsi dan juga sampah yang ditimbulkannya. Peningkatan jumlah sampah juga berasal dari semakin banyaknya usaha dalam bidang kuliner, yang menghasilkan sampah setiap harinya. Sampah juga bisa berasal dari kemajuan teknologi, sehingga masyarakat cenderung lebih konsumtif dan mengikuti perkembangan teknologi, untuk menggantikan teknologi yang lama (Sari dan Mussadun, 2016).

Gambaran umum kondisi sanitasi di Indonesia saat ini adalah dengan masih terdapatnya 60 juta penduduk tanpa akses sanitasi, 175.000 ton produksi sampah perhari, penanganan sampah yang masih berbasis pada TPA (Tempat Pemrosesan Akhir), lebih dari 90% kabupaten/kota masih menerapkan open dumping, dan hanya sebanyak 58.85% rumah tangga yang memiliki akses saluran drainase (Arsyi, 2017)

Adanya Deklarasi sidang-sidang PBB khususnya Deklarasi Habitat dan Agenda 21 tentang tempat tinggal yang layak bagi manusia dan pembangunan permukiman berkelanjutan yang perlu diwujudkan dalam kebijakan dan strategi penanganan persampahan permukiman, serta adanya Sustainable Development Goals (SDGs) yang merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan, menjadikan masalah persampahan semakin urgen.

Menurut Undang-undang No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis

sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah dapat dilakukan dengan metode 3R (Reuse, Reduce, dan Recycle) yang dapat dilakukan di sumber atau di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) sementara untuk penanganan sampah dapat dilakukan dengan pemilahan sampah berdasarkan komponennya, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan sampah baik dari sumber ke tempat penampungan sementara (TPS) atau dari TPST menuju tempat pemrosesan akhir.

Gambaran menurunnya kualitas pengelolaan sampah secara signifikan umumnya mulai terjadi sejak krisis ekonomi yang berkepanjangan menimpa seluruh kota di Indonesia. Hal tersebut berdampak pada penurunan kinerja sarana dan prasarana persampahan terutama kualitas TPA serta menurunnya kapasitas pembiayaan dan retribusi. Buruknya kinerja pengelolaan sampah mengakibatkan permasalahan yang serius yang perlu segera ditangani.

Jeneponto sebagai kabupaten yang sedang berkembang telah menghadapi banyak masalah dalam pengelolaan sampahnya. Pengelolaan sampah di Kabupaten Jeneponto difasilitasi dengan bank sampah induk sebanyak 1 unit, bank sampah unit sebanyak 5 unit, rumah kompos sebanyak 12 unit, TPS 3R sebanyak 1 unit, fasilitas pengelolaan sampah kota 1 unit dan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) sebanyak 1 unit (Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018).

Data timbulan sampah kabupaten jeneponto pada tahun 2017 sampah yang dapat dikelola hanya sebesar 35.90% sedangkan sampah yang tidak dikelola sebesar 64.10%. Pada tahun 2018 sampah yang dikelola 36.25% sedangkan sampah yang tidak dikelola 63.75% (Lampiran Jakstrada Jeneponto 2019).

Mengamati permasalahan penanganan sampah di lapangan termasuk di Kabupaten Jeneponto seperti menumpuknya sampah di pinggir jalan (karena keterlambatan pengangkutan atau tidak terangkut ke TPA), rute dan jadwal pengangkutan yang tidak pasti, makin banyaknya TPA liar dan pembuangan sampah ke sungai karena tidak adanya pelayanan yang memadai, kondisi lokasi TPA yang tidak memenuhi persyaratan serta fasilitas yang minim dan operasi yang open dumping sehingga kecenderungan mencemari lingkungan sangat tinggi. Kondisi ini juga sangat dipengaruhi oleh keterbatasan dana operasi dan pemeliharaan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan lemahnya penegakan hukum yang berkaitan dengan penerapan sanksi serta ketidakpedulian masyarakat akan perlunya menjaga kebersihan lingkungan.

Lebih jauh terkesan bahwa penanganan persampahan tidak didasarkan pada perencanaan yang matang bahkan beberapa Kota/Kabupaten termasuk kabupaten Jeneponto masih belum memiliki dokumen perencanaan sama sekali.

Sektor pengelolaan air limbah domestik juga demikian, sampai saat ini sarana Instalasi Pengelolaan Air limbah (IPAL) maupun Instalasi

Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) belum ada di Kabupaten Jeneponto kecuali di RSUD Lanto Daeng Pasewang yang sudah memiliki IPAL.

Pengelolaan sanitasi meliputi promosi hiegiene dan sanitasi, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, dan pengelolaan drainase. Selain itu ada juga komponen lain yang terkait dengan sanitasi adalah pengelolaan air bersih/minum, pengelolaan limbah industri rumah tangga dan pengelolaan limbah medis.

Wilayah kajian dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Jeneponto meliputi 11 kecamatan yaitu Kecamatan Bangkala, Kecamatan Bangkala Barat, Kecamatan Tamalatea, Kecamatan Bontoramba, Kecamatan Binamu, Kecamatan Turatea, Kecamatan Batang, Kecamatan Arungkeke, Kecamatan Tarowang, Kecamatan Kelara dan Kecamatan Rumbia. (Lihat Peta . Peta Wilayah Kajian Sanitasi Kabupaten Jeneponto).



**Gambar 1.1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Jeneponto**

Pengelolaan persampahan tidak dapat dipisahkan dengan peran kelembagaan. Pengelolaan sampah pada dasarnya melibatkan pemangku

kepentingan. Dalam pengelolaan sampah yang berbasis 3R (Reduce/mengurangi sampah untuk mencegah penimbunan, Reuse/penggunaan kembali barang yang telah dipakai dan Recycle/mendaur ulang sampah menjadi barang yang bernilai ekonomis), pemangku kepentingan terdiri dari masyarakat penghasil sampah, LSM, pihak swasta, pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Masing-masing pemangku kepentingan tersebut memiliki peran dalam pengelolaan persampahan.

Karena itu untuk mewujudkan konsep pengelolaan sampah yang ideal di suatu wilayah, maka diperlukan suatu perencanaan atau strategi yang diharapkan menjadi acuan dalam pengelolaan sampah di suatu wilayah.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembahasan sebelumnya maka ditarik suatu rumusan masalah adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana kondisi persampahan di Kabupaten Jeneponto saat ini.
- b. Bagaimana kondisi pengelolaan sampah yang berjalan di Kabupaten Jeneponto selama ini.
- c. Bagaimana strategi pelibatan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah yang lebih efektif di kota jeneponto

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian tersebut:

- a. Menganalisis kondisi persampahan di Kabupaten Jeneponto saat ini.

- b. Menganalisis kondisi pengelolaan sampah yang berjalan di Kabupaten Jenepono selama ini.
- c. Mendesain strategi pelibatan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah yang lebih efektif di Kabupaten jenepono.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tersusunnya strategi pelibatan para pemangku kepentingan untuk pengelolaan sampah yang lebih efektif di kabupaten jenepono.

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Mengingat banyaknya tahapan pada proses pembuatan rencana pengelolaan persampahan ,penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini pada tahap penyusunan strategi pelibatan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Jenepono.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Stakeholder Dalam Pengelolaan Sampah**

Stakeholder adalah semua pihak didalam masyarakat, baik itu individu, komunitas atau kelompok masyarakat, yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap sebuah organisasi/perusahaan dan isu/permasalahan yang sedang diangkat (Syaikhul,2019). Dalam terjemahan bahasa Indonesia, arti stakeholder adalah pemangku kepentingan atau pihak yang berkepentingan

Stakeholder dipandang sebagai komponen penting dari pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang baik. Salah satu aspek mendasar dari pengelolaan sumber daya alam adalah bagaimana orang memandang dan menghargai lingkungan. Nilai yang dianggap berasal dari sumber daya alam akan menjadi salah satu penentu dalam pilihan yang dihadapi orang sehubungan dengan manajemen mereka baik dari skala lokal ke skala internasional, membutuhkan partisipasi pemangku kepentingan dari keanekaragaman pengetahuan, persepsi dan nilai-nilai alam (Billgren dan Holmen, 2008).

Secara umum, stakeholder dapat dikelompokkan berdasarkan kekuatan, posisi, dan pengaruhnya. Adapun klasifikasi stakeholder adalah sebagai berikut ( Ardiansyah, 2019):

- a. Stakeholder primer merupakan stakeholder yang memiliki kaitan kepentingan secara langsung dengan sesuatu kebijakan, program, dan proyek. Mereka harus ditempatkan sebagai penentu utama dalam proses pengambilan keputusan yaitu masyarakat dan tokoh masyarakat.
- b. Stakeholder sekunder adalah stakeholder yang tidak memiliki kaitan kepentingan secara langsung terhadap suatu kebijakan, program, dan proyek, tetapi memiliki kepedulian (concern) dan keprihatinan sehingga mereka turut bersuara dan berpengaruh terhadap sikap masyarakat dan keputusan legal pemerintah yaitu lembaga (aparatur), lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), Akademisi, dan pengusaha.
- c. Stakeholder kunci merupakan elemen eksekutif berdasarkan level mereka yang memiliki otoritas hukum untuk mengambil keputusan, legislatif dan instansi yaitu pemerintah daerah, DPRD kabupaten, dan Dinas yang membawahi langsung program/proyek yang bersangkutan.

Para ahli telah mendefinisikan keterlibatan stakeholder sebagai proses sosial yang bekerjasama untuk menemukan solusi kolektif untuk masalah tertentu (Green dan Penning-Rowsell, 2010).

Pemangku kepentingan dapat berupa organisasi, komunitas, kelompok sosial ekonomi, pemerintah, atau lembaga yang berasal dari berbagai dimensi pada setiap tingkat golongan masyarakat (Iqbal,

2007:90). Pemangku kepentingan dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok. Kelompok tersebut adalah pemangku kepentingan utama, penunjang, dan kunci (Crosby, 1992).

Pemangku kepentingan utama merupakan pemangku kepentingan yang menerima dampak positif dan negatif dari suatu kegiatan. Pemangku kepentingan penunjang merupakan perantara yang membantu proses penyampaian kegiatan. Pemangku kepentingan kunci yakni yang mempunyai pengaruh kuat atau penting terkait dengan masalah, kebutuhan, dan perhatian terhadap kelancaran kegiatan (Iqbal, 2007:90). Pendapat lain mengatakan bahwa, pemangku kepentingan dapat dibagi menjadi pemangku kepentingan sektor swasta, sektor publik dan masyarakat sipil (Start dan Hovland,2010). Berdasarkan pengertian mengenai pemangku kepentingan tersebut, maka dua klasifikasi pemangku kepentingan tersebut sama saja, yaitu pemangku kepentingan utama sama dengan masyarakat sipil, sektor swasta sama dengan penunjang, dan sektor publik sama dengan pemangku kepentingan kunci.

Dalam pengelolaan persampahan yang rumit, terdapat beragam stakeholder (pemangku kepentingan) yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung. Setiap stakeholder (pemangku kepentingan) berperan sesuai dengan posisinya masing-masing.

Masing-masing pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan sampah mempunyai karakteristik yang berbeda.

Karakteristik tersebut meliputi tingkat kepentingan dan pengaruh masing-masing pemangku kepentingan tersebut. Ada pemangku kepentingan yang memiliki pengaruh besar, tapi tidak memiliki kepentingan yang cukup besar dalam pelaksanaan pengelolaan sampah. Ada pula pemangku kepentingan yang tidak mempunyai pengaruh besar, tapi memiliki peran penting dalam menganalisis dan melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam pengelolaan sampah tersebut.

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus dianggap sebagai stakeholder yang penting. Hal ini dikarenakan kebijakan yang dibuat pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, akan sangat menentukan strategi perusahaan dalam menjalankan perusahaan (Ma, Wang, Wu, & Tseng, 2018).

Pentingnya peran stakeholder terhadap perusahaan membuat perusahaan perlu melakukan analisis stakeholder. Mitchell, Agle, dan Wood (1997) dalam Clement (2005) menyatakan bahwa terdapat tiga karakteristik yang menunjukkan seberapa penting suatu stakeholder bagi perusahaan, yaitu kekuatan (power), urgensi (urgency), dan hak kekuasaan (legitimacy). Suatu stakeholder dianggap mempunyai kekuatan ketika dapat memaksakan kehendaknya dalam hubungan dengan perusahaan.

Peran pemangku kepentingan, seperti pemerintah dan swasta hanya sebagai pendamping, pembina, dan pengawas berjalannya kegiatan dalam pengelolaan sampah tersebut. Batasan peran perlu ditegaskan

sehingga masyarakat dalam pengelolaan sampah tidak terus- menerus bergantung pada bantuan pemangku kepentingan lain. Peran pemangku kepentingan diperlukan hingga terbentuk karakteristik masyarakat yang peduli dan mengerti dalam pengelolaan sampah.

## **B. Pengelolaan Sampah**

Sampah adalah istilah umum yang sering digunakan untuk menyatakan limbah padat. Sampah adalah sisa-sisa bahan yang mengalami perlakuan-perlakuan, baik karena telah sudah diambil bagian utamanya, atau karena pengolahan, atau karena sudah tidak ada manfaatnya yang ditinjau dari segi social ekonomis tidak ada harganya dan dari segi lingkungan dapat menyebabkan pencemaran atau gangguan terhadap lingkungan hidup.

Beberapa sumber sampah dapat diklasifikasikan menjadi antara lain: perumahan, komersil, institusi, konstruksi dan pembongkaran, pelayanan perkotaan, unit pengolahan, industri, dan pertanian.

Berdasarkan bahan asalnya sampah dibagi menjadi dua jenis yaitu sampah organik dan anorganik. Sampah organik yaitu buangan sisa makanan misalnya daging, buah, sayuran dan sebagainya. Contoh sampah dari zat anorganik adalah: potongan-potongan/ pelat-pelat dari logam, berbagai jenis batu-batuan, pecahan-pecahan gelas, tulang, belulang, dan lain-lain. Sampah jenis ini, melihat fisiknya keras maka baik untuk peninggian tanah rendah atau dapat pula untuk memperluas jalan setapak. Tetapi bila rajin mengusahkannya sampah

dari logam dapat kembali dilebur untuk dijadikan barang yang berguna, batu-batuan untuk mengurung tanah yang rendah atau memperkeras jalan setapak, pecahan gelas dapat dilebur kembali dan dijadikan barang-barang berguna, dan tulang-belulang bila dihaluskan (dan diproses) dapat untuk pupuk dan lain-lain. Sampah anorganik yaitu sisa material sintetis misalnya plastik, kertas, logam, kaca, keramik dan sebagainya.

Pengelolaan Sampah merupakan bagian dari penanganan sampah dan menurut UU No. 18 Tahun 2008 didefinisikan sebagai proses perubahan bentuk sampah dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah (Margaretha et. al, 2019).

Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang dimaksud untuk mengurangi jumlah sampah, disamping memanfaatkan nilai yang masih terkandung dalam sampah itu sendiri (bahan daur ulang, produk lain dan energi). Pengolahan sampah dapat dilakukan berupa : pengomposan, recycling/daur ulang, pembakaran (insinerasi), dan lain-lain.

Pengelolaan secara umum merupakan proses transformasi sampah baik secara fisik, kimia maupun biologi. Praktik pengelolaan sampah berbeda beda antara negara maju dan negara berkembang, berbeda juga antara daerah perkotaan dengan daerah pedesaan dan antara daerah perumahan dengan daerah industri. Pengelolaan sampah yang tidak berbahaya dari pemukiman dan institusi di area metropolitan biasanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, sedangkan untuk

sampah dari area komersial dan industri biasanya ditangani oleh perusahaan pengolah sampah.

Metode pengelolaan sampah berbeda-beda tergantung banyak hal, di antaranya tipe zat sampah, lahan yang digunakan untuk mengolah, dan ketersediaan lahan.

Peneliti dari Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada (UGM) mengatakan volume sampah dunia di kota-kota besarnya saja sudah mencapai 1,3 miliar ton sampah pada setiap tahunnya. Jumlah ini diprediksi naik menjadi 2,2 miliar ton sampah pada tahun 2025 (Pitoyo,2019).

Pengelolaan sampah efektif diperlukan agar jumlah sampah dunia tidak terus meningkat. Ini pekerjaan rumah yang besar. Tapi, pengelolaan sampah efektif ini tidak sulit dilakukan. Dimulai dari rumah masing-masing, ditularkan ke lingkungan terdekat, dan diharapkan menjadi gaya hidup yang masif. Sederhananya, pengelolaan sampah efektif adalah langkah awal yang dapat kita lakukan sebagai wujud kepedulian pada lingkungan. Pengelolaan sampah efektif dilakukan dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle).

Berbagai macam sampah yang telah disebutkan diatas hanyalah sebagian kecil saja dari sumber- sumber sampah yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan manusia tidak akan pernah lepas dari sampah. Terutama penumpukan sampah yang terjadi di tempat-tempat umum seperti di pasar-pasar.

Jenis-jenis sampah jenis sampah yang ada di sekitar kita cukup beraneka ragam, ada yang berupa sampah rumah tangga, sampah industri, sampah pasar, sampah rumah sakit, sampah pertanian, sampah perkebunan, sampah peternakan, sampah institusi/kantor/sekolah, dan sebagainya.

Berdasarkan asalnya, sampah padat dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut :

- a. Sampah organik, adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan hayati yang dapat didegradasi oleh mikroba atau bersifat biodegradable. Sampah ini dengan mudah dapat diuraikan melalui proses alami. Sampah rumah tangga sebagian besar merupakan bahan organik. Termasuk sampah organik, misalnya sampah dari dapur, sisa-sisa makanan, pembungkus (selain kertas, karet dan plastik), tepung, sayuran, kulit buah, daun dan ranting. Selain itu, pasar tradisional juga banyak menyumbangkan sampah organik seperti sampah sayuran, buah-buahan dan lain-lain.
- b. Sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non hayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang. Sampah anorganik dibedakan menjadi : sampah logam dan produk-produk olahannya, sampah plastik, sampah kertas, sampah kaca dan keramik, sampah detergen. Sebagian besar anorganik tidak dapat diurai oleh alam/mikroorganisme secara keseluruhan (unbiodegradable). Sementara,

sebagian lainnya hanya dapat diuraikan dalam waktu yang lama. Sampah jenis ini pada tingkat rumah tangga misalnya botol plastik, botol gelas, tas plastik, dan kaleng, (Gelbert dkk, 1996)

Berdasarkan wujud atau bentuknya dikenal tiga macam sampah atau limbah yaitu : limbah cair, limbah padat, dan limbah gas. Contoh limbah cair yaitu air cucian, air sabun, minyak goreng sisa, dll. Contoh limbah padat yaitu bungkus snack, ban bekas, botol air minum, dll. Contoh limbah gas yaitu karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), karbon monoksida (CO), HCl, NO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub> dll.

Dampak negatif sampah-sampah padat yang bertumpuk banyak tidak dapat teruraikan dalam waktu yang lama akan mencemarkan tanah. Yang dikategorikan sampah disini adalah bahan yang tidak dipakai lagi ( refuse) karena telah diambil bagian-bagian utamanya dengan pengolahan menjadi bagian yang tidak disukai dan secara ekonomi tidak ada harganya.

Menurut Gelbert dkk (1996) dampak sampah terhadap manusia dan lingkungan yaitu:

a. Dampak terhadap kesehatan

Lokasi dan pengelolaan sampah yang kurang memadai (pembuangan sampah yang tidak terkontrol) merupakan tempat yang cocok bagi beberapa organisme dan menarik bagi berbagai binatang seperti, lalat dan anjing yang dapat menjangkitkan penyakit. Potensi bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan adalah sebagai berikut : Penyakit diare, kolera,

tifus menyebar dengan cepat karena virus yang berasal dari sampah dengan pengelolaan tidak tepat dapat bercampur air minum. Penyakit demam berdarah (haemorrhagic fever) dapat juga meningkat dengan cepat di daerah yang pengelolaan sampahnya kurang memadai. Penyakit jamur dapat juga menyebar (misalnya jamur kulit). Penyakit yang dapat menyebar melalui rantai makanan. Salahsatu contohnya adalah suatu penyakit yang ditularkan oleh cacing pita(taenia). Cacing ini sebelumnya masuk kedalam pencernaan binatang ternak melalui makanannya yang berupa sisa makanan/sampah.

b. Dampak terhadap lingkungan

Cairan rembesan sampah yang masuk kedalam drainase atau sungai akan mencemari air. Berbagai organisme termasuk ikan dapat mati sehingga beberapa spesies akan lenyap, hal ini mengakibatkan berubahnya ekosistem perairan biologis. Penguraian sampah yang di buang kedalam air akan menghasilkan asam organik dan gas cair organik, seperti metana. Selain berbau kurang sedap, gas ini pada konsentrasi tinggi dapat meledak.

Tingkat pelayanan persampahan baru mencapai 79,80% baik yang sesuai maupun yang belum sesuai Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013, sementara target universal akses sebesar 100% dan sesuai NSPK. Peningkatan timbulan sampah tidak diimbangi dengan peningkatan prasarana dan sarana pengelolaan sampah.

Kondisi yang ada saat ini, pemilahan dan pengurangan sampah sejak dari sumbernya (rumah tangga) masih kurang memadai, sehingga berbagai gerakan perlu ditingkatkan melalui peranan tokoh masyarakat, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) ataupun pemerintah.

Penyelenggaraan Tempat Pengolahan Sampah *Reduce-Reuse-Recycle* (TPS 3R) merupakan pola pendekatan pengelolaan persampahan pada skala komunal atau kawasan, dengan melibatkan peran aktif pemerintah dan masyarakat, melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat, termasuk untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan/atau yang tinggal di permukiman yang padat dan kumuh. Penanganan sampah dengan pendekatan infrastruktur TPS 3R lebih menekankan kepada cara pengurangan, pemanfaatan dan pengolahan sejak dari sumbernya pada skala komunal (area permukiman, area komersial, area perkantoran, area pendidikan, area wisata, dan lain-lain). Dalam pelaksanaannya pengelolaan sampah merupakan rangkaian subsistem pewadahan, subsistem pengumpulan, subsistem pengangkutan, subsistem pengolahan, dan subsistem pemrosesan akhir, dimana infrastruktur TPS 3R merupakan bagian dari sub sistem pengolahan (pada skala komunal, berbasis masyarakat).

Konsep utama pengolahan sampah pada TPS 3R, adalah untuk mengurangi kuantitas dan/atau memperbaiki karakteristik sampah, yang akan diolah secara lebih lanjut di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah. TPS 3R tidak ditujukan untuk menghasilkan suatu produk, tidak

berperan sebagai pabrik (misalnya, sebagai pabrik kompos, pabrik gas bio, atau pabrik sampah daur ulang), melainkan berperan dalam menjamin kebutuhan lahan yang semakin kritis untuk penyediaan TPA sampah di perkotaan. Hal ini sejalan dengan kebijakan nasional, untuk meletakkan TPA sampah pada hirarki terbawah, sehingga meminimasi residu saja untuk diurug dalam TPA sampah.

Dalam sistem perkotaan, maka TPS 3R berperan sebagai infrastruktur dalam penanganan sampah. Jumlah, kapasitas, dan fungsinya harus dipastikan, karena merupakan upaya untuk mengurangi kuantitas dan/atau karakteristik sampah yang masih harus diproses lebih lanjut pada TPA sampah, dimana pengurangan sampah dilakukan dari sumber sampah (wadah sampah di lokasi sumber sampah) ke wadah sampah yang ada di luar sumber sampah, sebelum dikumpulkan atau diangkut melalui sistem kota ke TPS 3R, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) berbasis institusi atau TPA sampah (Juknis TPS 3R,2016).

**Gambar 2.1. Metode Pengelolaan Sampah dengan Sistem 3R**



Sampah dari tempat-tempat umum dan perdagangan adalah tempat yang dimungkinkan banyaknya orang berkumpul dan melakukan kegiatan. Tempat-tempat tersebut mempunyai potensi yang cukup besar dalam memproduksi sampah termasuk tempat perdagangan seperti pertokoan dan pasar. Jenis sampah yang dihasilkan umumnya berupa sisa-sisa makanan, sayuran busuk, sampah kering, abu, plastik, kertas, dan kaleng-kaleng serta sampah lainnya.

### **C. Kerangka Pemikiran**

Timbulan sampah di kabupaten/kota termasuk Jenepono menunjukkan trend yang terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk, meningkatnya kegiatan pembangunan, dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Hal ini lah yang mengakibatkan penumpukan sampah di TPA, karena kurangnya armada pengangkutan sampah ke TPA hingga membuat penumpukan sampah di pinggir jalan.

Menurut (Mizanur Rahman, et. al, 2015) berjalannya program pemerintah dengan system top-down (kebijakan) memunculkan beberapa permasalahan pengolahan sampah yaitu : sosialisasi ke masyarakat yang kurang, regulasi dan penyediaan TPST 3R yang kurang memadai.

Alur kerangka pikir dari penelitian ini adalah adanya permasalahan sampah di Kabupaten Kota Jenepono yang mengakibatkan penumpukan sampah di pinggir jalan Kota Jenepono, kurangnya armada pengangkutan sampah yang menyebabkan penumpukan

sampah di TPA. Dari beberapa permasalahan persampahan yang ada di Kabupaten Jenepono menunjukkan bahwa volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat terus berkembang, sementara upaya yang dilakukan pemerintah dengan hanya mengambil sampah dari sumber sampah untuk ditampung di Tempat Penampungan Akhir (TPA), hanya akan mengurangi daya tampung TPA. Minimnya fasilitas pengangkutan yang dimiliki pemerintah untuk memindahkan persampahan dari rumah tangga ke TPS maupun TPA, menjadikan sampah rumah tangga sering menumpuk di depan rumah, sehingga merusak keindahan kota, bahkan dapat menimbulkan sumber penyakit dan polusi udara (karena bau sampah). Oleh karenanya pemerintah sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab dalam menjaga lingkungan hidup di wilayahnya, harus mampu untuk mengembangkan beberapa upaya dalam pengelolaan sampah. Dapat dilihat bahwa sebagai sistem, maka masing-masing subsistem/ aspek dalam pengelolaan persampahan saling terkait dan saling mendukung, dan sebagai produsen (sumber) sampah sekaligus konsumen (penerima manfaat) pelayanan sampah, maka aspek peran serta masyarakat merupakan faktor paling dominan dalam sistem pengelolaan persampahan.

Dengan adanya permasalahan tersebut, maka diperlukan upaya-upaya yang lebih komprehensif untuk mencari sistem pengelolaan sampah, baik dari segi kelembagaan maupun operasionalnya. Dalam hal ini dibutuhkan rencana pengolahan sampah yang efisien dalam hal

pemberdayaan masyarakat dalam melakukan pola 3R (Reduce-Reuse-Recycle) untuk mengatasi permasalahan sampah di Kabupaten Kota Jeneponto.

Sehingga dibutuhkan strategi pelibatan stakeholder dalam pengolahan sampah. Stakeholders terdiri dari masyarakat penghasil sampah, LSM, pihak swasta, pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Masing-masing stakeholder tersebut memiliki peran dalam pengelolaan persampahan. Perencanaan program pemberdayaan masyarakat lebih dititikberatkan pada upaya peningkatan peranserta masyarakat sejak awal, dari perencanaan sampai pelaksanaan program pengelolaan kebersihan lingkungan berkelanjutan. Kunci pengelolaan kebersihan lingkungan berkelanjutan, khususnya sampah perkotaan sebenarnya terletak pada tahap proses sosialisasi, pengembangan opini, sehingga menjadi perilaku dan kebiasaan, yang akhirnya akan membudaya di tingkat rumah tangga dan di tingkat lingkungan/ kelurahan untuk memisahkan sampah organik dan anorganik serta kegiatan 3R lainnya.